



## Perbandingan Tata Kelola Pemerintahan dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana: Studi Tsunami 2004 dan Banjir 2025 di Aceh

### Author

Muhammad Alfhat Ghifari<sup>1</sup>, M. Rafi<sup>2</sup>, Riza Albashir<sup>3</sup>, Mukhrijal Mukhrijal<sup>4</sup>

### Affiliation:

<sup>1234</sup> Ilmu Pemerintahan  
Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Indonesia

### Email:

<sup>1</sup>alfhat@mhs.usk.ac.id, <sup>2</sup>rafi23.mhs.usk.ac.id, <sup>3</sup>rizaal23.mhs.usk.c, <sup>4</sup>mukhrijal@usk.ac.id

### Data:

Submitted: 27-04-2026;  
Revision: 7-05-2026;  
Accepted: 13-05-2026;  
Published: 22-05-2026.

### ABSTRACT:

*This study analyzes the dynamics of governance in post-disaster rehabilitation and reconstruction in Aceh through a comparative approach between the 2004 tsunami and the 2025 flood. Using a qualitative approach and a comparative method, secondary data were collected through a literature review including scientific journals, government reports, and relevant academic publications. The cases were analyzed based on key governance indicators: institutional coordination, transparency and accountability, community participation, and policy implementation effectiveness. Findings indicate that the 2004 tsunami involved high actor complexity and strong international intervention, leading to a multi-level governance model coordinated by the Rehabilitation and Reconstruction Agency (BRR). Conversely, the 2025 flood reflects a more decentralized, domestically driven governance approach, yet challenges remain in local institutional capacity, risk-based spatial planning, and disaster mitigation effectiveness. Community participation remains crucial for recovery but is contextually implemented. The study concludes that governance has shifted from global intervention to strengthening local capacity; however, modern disaster risks require further integration of disaster management policies and sustainable development planning to enhance adaptive and resilient systems.*

**Keywords:** Post Disaster Governance; Rehabilitation and Reconstruction; Aceh Tsunami 2004; Aceh Flood 2025; Community Participation

### ABSTRAK:

Penelitian ini menganalisis dinamika tata kelola pemerintahan dalam rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh melalui pendekatan komparatif antara tsunami 2004 dan banjir 2025. Pendekatan kualitatif dan metode komparatif digunakan dengan pengumpulan data sekunder melalui studi kepustakaan, mencakup jurnal ilmiah, laporan pemerintah, dan publikasi akademik terkait. Analisis dilakukan berdasarkan indikator utama tata kelola: koordinasi kelembagaan, transparansi dan akuntabilitas, partisipasi masyarakat, serta efektivitas implementasi kebijakan. Hasil menunjukkan tsunami 2004 ditandai kompleksitas aktor tinggi dan intervensi internasional yang kuat, sehingga membentuk model *multi-level governance* dengan koordinasi oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR). Sebaliknya, banjir 2025 menunjukkan pendekatan tata kelola desentralistik berbasis kapasitas domestik, namun masih menghadapi keterbatasan kapasitas kelembagaan, tata ruang berbasis risiko, dan efektivitas mitigasi bencana. Partisipasi masyarakat tetap menjadi faktor kunci, meski implementasinya bersifat kontekstual. Penelitian menyimpulkan telah terjadi pergeseran paradigma dari intervensi global ke penguatan kapasitas lokal; namun, risiko bencana modern menuntut integrasi kebijakan penanggulangan bencana dengan perencanaan pembangunan berkelanjutan untuk mewujudkan sistem yang adaptif dan tangguh.

**Kata Kunci:** Tata Kelola Pascabencana; Rehabilitasi dan Rekonstruksi; Tsunami Aceh 2004; Banjir Aceh 2025; Partisipasi Masyarakat

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat kerentanan bencana tertinggi di dunia, terutama terhadap gempa bumi, tsunami, banjir, dan longsor. Catatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan bahwa sepanjang periode 2010–2023 terjadi rata-rata 2.000–3.500 kejadian bencana per tahun, dengan banjir sebagai bencana paling dominan yang mencakup lebih dari 40 % dari total kejadian (BNPB, 2021). Provinsi Aceh menjadi salah satu wilayah paling terdampak, dengan sejarah bencana besar yang telah mengubah lanskap sosial, politik, dan kelembagaan secara fundamental. Tsunami 26 Desember 2004 yang dipicu oleh gempa berkekuatan 9,1 magnitudo menghancurkan infrastruktur dan menyebabkan kerugian kemanusiaan dan material yang sangat besar—bukan hanya kerusakan fisik, tetapi juga runtuhnya sistem pemerintahan lokal yang memerlukan intervensi tata kelola berskala global yang belum pernah terjadi sebelumnya di Indonesia (BRR Aceh-Nias, 2009). Kerangka DRR (Disaster Risk Reduction) yang terintegrasi dengan adaptasi perubahan iklim pascatsunami masih menghadapi tantangan dalam koordinasi antar lembaga, komitmen politik, partisipasi masyarakat, dan kapasitas fiskal di tingkat lokal, meskipun telah menjadi fokus kebijakan nasional dan subnasional selama dua dekade terakhir (Sufri & Lassa, 2024).

Dua dekade setelah tsunami, Aceh kembali menghadapi krisis kebencanaan dalam skala dan paradigma yang berbeda. Banjir besar yang melanda Aceh pada akhir 2025 menyebabkan dampak signifikan di banyak kabupaten, termasuk jutaan jiwa terdampak, kerusakan infrastruktur, dan gangguan aktivitas sosioekonomi yang luas. Data terbaru dari BNPB menunjukkan bahwa respons banjir 2025 menekankan peran pemerintah daerah dan implementasi kebijakan mitigasi risiko yang bersifat desentralistik, berbeda dengan pendekatan terpusat dan intervensi internasional pada periode pascatsunami (BNPB, 2025). Perbedaan ini mencerminkan transformasi model tata kelola pascabencana menuju *multilevel governance*, di mana urusan publik tidak hanya dimonopoli oleh pemerintah pusat tetapi dikoordinasikan secara vertikal dan horizontal antar tingkatan pemerintahan serta melibatkan aktor nonnegara.

Proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana pada dasarnya merupakan momentum penting untuk membangun kembali tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Dalam konteks tsunami 2004, pembentukan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh Nias yang mengelola dana lebih dari USD 7 miliar menjadi pusat koordinasi utama yang memperkenalkan praktik partisipasi masyarakat (*community participation*) dalam perencanaan dan pelaksanaan pemulihan, yang memperkuat modal sosial masyarakat terdampak serta rasa kepemilikan kolektif atas proses pemulihan (BRR Nias, 2009).

Namun, tantangan DRR masih menjadi isu sentral dalam tata kelola pascabencana kontemporer di Aceh. Integrasi antara prinsip DRR dan adaptasi perubahan iklim belum optimal; peringatan dini banjir belum terintegrasi menyeluruh dan perencanaan ruang berbasis risiko baru diterapkan secara parsial, sehingga mempertanyakan sejauh mana ketangguhan (*resilience*)—kapasitas sistem sosial untuk menyerap guncangan, beradaptasi, dan bangkit lebih kuat (*build back better*)—benar-benar tertanam dalam kebijakan dan praktik di tingkat lokal (Sufri & Lassa, 2024).

Sejumlah studi telah mendokumentasikan dinamika tata kelola pascabencana di Aceh dari berbagai perspektif, mulai dari koordinasi antar badan dalam era BRR, hingga tantangan integrasi kebijakan mitigasi risiko dan adaptasi lokal (Mangkusubroto, 2011; Lassa, 2019; Radyan et al., 2024;

Irwansyah et al., 2024; Sasaki et al., 2025). Meskipun demikian, studi tersebut cenderung parsial pada satu peristiwa bencana dan belum mengevaluasi transformasi kapabilitas tata kelola secara longitudinal di dua periode yang berbeda. Hal inilah yang menjadi kesenjangan (*gap*) penelitian: belum adanya kerangka komparatif sistematis yang menelaah pengaruh pergeseran paradigma governance dari model *globalintervention* menuju *decentralized multilevel governance* terhadap efektivitas rehabilitasi dan rekonstruksi dalam konteks yang sama.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan dinamika tata kelola pemerintahan dalam rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh antara tsunami 2004 dan banjir 2025, dengan fokus pada empat indikator utama: koordinasi kelembagaan, transparansi dan akuntabilitas, partisipasi masyarakat, serta efektivitas implementasi kebijakan. Kebaruan studi ini terletak pada integrasi konsep *multilevel governance* dan *resilience* dalam kerangka komparatif dua dekade, yang diharapkan memberikan kontribusi teoritis dan praktis untuk model tata kelola pascabencana yang lebih adaptif, partisipatif, dan tangguh di Indonesia.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode komparatif. Jenis penelitian yang diterapkan adalah penelitian deskriptif-komparatif berbasis studi kepustakaan (*library research*). Fokus penelitian diarahkan pada dinamika tata kelola pemerintahan dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Provinsi Aceh, membandingkan dua peristiwa besar, yaitu Tsunami Aceh 2004 dan Banjir Aceh 2025 (Creswell & Poth, 2023).

Data yang digunakan dalam penelitian ini sepenuhnya merupakan data sekunder (Arikunto, 2013; Sugiyono, 2021). Jenis data yang dianalisis meliputi laporan resmi pemerintah, seperti BNPB, Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), dan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh-Nias (BRR Aceh-Nias), artikel jurnal ilmiah, regulasi dan kebijakan terkait kebencanaan, laporan lembaga internasional, serta berita dari media yang kredibel. Pengumpulan dokumen dibatasi pada rentang publikasi tahun 2005–2026 agar mampu merepresentasikan perkembangan historis hingga kondisi terkini terkait tata kelola rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh (Almusaed et al., 2025).

Dalam proses seleksi literatur, penelitian ini menerapkan kriteria inklusi dan eksklusi untuk menjaga relevansi dan kualitas data. Dokumen yang dimasukkan adalah yang secara eksplisit membahas Tsunami Aceh 2004 dan/atau Banjir Aceh 2025, tata kelola pemerintahan, rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, serta instrumen Pengurangan Risiko Bencana (*Disaster Risk Reduction/ DRR*). Sebaliknya, dokumen yang tidak memuat data kelembagaan yang jelas, artikel opini populer tanpa basis data yang valid, serta sumber dengan kredibilitas akademik maupun institusional yang tidak dapat diverifikasi dikecualikan dari analisis (Yin, 2018).

Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi, dengan menelaah berbagai sumber tertulis yang relevan. Setelah terkumpul, data dianalisis menggunakan analisis komparatif kualitatif, melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles et al., 2018). Secara operasional, analisis difasilitasi dengan matriks komparatif untuk membandingkan kedua peristiwa bencana berdasarkan empat indikator utama tata kelola pemerintahan, yaitu: koordinasi kelembagaan, transparansi dan akuntabilitas, partisipasi masyarakat, serta efektivitas implementasi kebijakan. Matriks ini memungkinkan identifikasi persamaan, perbedaan, serta perubahan pola tata

kelola secara sistematis dan terstruktur.

Untuk memastikan validitas dan keandalan data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi antarsumber melalui uji silang (*cross-check*) antara artikel akademik, laporan institusi, regulasi pemerintah, laporan lembaga internasional, dan berita kredibel (Creswell, 2016). Selain itu, dilakukan pemeriksaan konsistensi data antar-sumber guna meminimalkan bias interpretasi dan meningkatkan akurasi temuan penelitian.

**Tabel 1. Unsur dan Penjelasan Metode Penelitian**

Unsur Metode	Keterangan
<b>Jenis Data</b>	Data sekunder, meliputi jurnal ilmiah terindeks, laporan resmi institusi pemerintah (BNPB, BRR Aceh-Nias), regulasi kebijakan, dan publikasi akademik terkait rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh.
<b>Rentang Dokumen</b>	Dokumen yang dipublikasikan antara tahun 2004–2025, mencakup laporan BRR Aceh-Nias (2009), laporan BNPB (2021, 2025), dan jurnal ilmiah relevan dengan periode tsunami 2004 dan banjir 2025.
<b>Kriteria Inklusi</b>	Jurnal ilmiah terindeks dengan relevansi langsung terhadap tata kelola pascabencana di Aceh Laporan resmi BNPB dan BRR Aceh-Nias yang memuat data empiris terverifikasi Regulasi kebijakan kebencanaan Publikasi lembaga internasional (misal UNDP) terkait rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana
<b>Kriteria Eksklusi</b>	Sumber yang tidak dapat diverifikasi keasliannya Publikasi yang tidak relevan secara substansial Dokumen tanpa informasi penulis atau lembaga penerbit yang jelas Data primer yang belum melalui proses validasi institusional
<b>Teknik Analisis</b>	Analisis komparatif kualitatif melalui tiga tahapan: 1. Reduksi data — pemilahan informasi berdasarkan empat indikator tata kelola 2. Penyajian data — penyusunan temuan dalam matriks perbandingan 3. Penarikan kesimpulan — interpretasi pola perbedaan dan pergeseran paradigma tata kelola antara kedua kasus
<b>Validitas</b>	Triangulasi sumber melalui uji silang ( <i>cross-check</i> ) antar hasil penelitian dari minimal dua sumber institusional berbeda untuk setiap temuan, guna meminimalkan bias dan meningkatkan validitas internal.

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2026

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Komparasi Tata Kelola Pascabencana

Analisis dokumen secara sistematis terhadap penanganan Tsunami Aceh 2004 dan Banjir Aceh 2025 mengungkap adanya perbedaan karakteristik yang signifikan pada empat indikator utama tata kelola. Perbedaan ini muncul akibat variasi karakteristik bencana serta kondisi awal kelembagaan

**Tabel 1. Perbandingan Tata Kelola Pascabencana: Tsunami 2004 dan Banjir 2025 di Aceh**

Indikator	Tsunami Aceh 2004	Banjir Aceh 2025
Koordinasi Kelembagaan	Multi-level governance; BRR sebagai hub koordinasi untuk lebih dari 600 lembaga donor internasional dan nasional.	Desentralistik; BNPB–BPBD sebagai koordinator domestik utama; keterlibatan aktor internasional sangat terbatas.
Transparansi & Akuntabilitas	Mekanisme pelaporan ketat sesuai standar donor; diaudit oleh BPK dan lembaga internasional; sering terjadi tumpang tindih program.	Pelaporan berbasis sistem birokrasi rutin pemerintah; kapasitas pengawasan lokal terbatas; akuntabilitas bersifat internal.
Partisipasi Masyarakat	Terstruktur melalui program berbasis komunitas (misal: ANSSP); pendekatan <i>community-driven development</i> dengan pendanaan besar.	Bersifat ad hoc dan kontekstual; belum ada platform partisipasi yang terstandarisasi di tingkat birokrasi daerah.
Efektivitas Kebijakan	Cukup efektif berkat ketersediaan dana (7,2 miliar USD) dan wewenang khusus BRR; berfokus pada rekonstruksi fisik dan sosial.	Terkendala kapasitas fiskal BPBD; lemahnya integrasi tata ruang berbasis risiko; sistem peringatan dini ( <i>Early Warning System</i> ) belum optimal.

Sumber: Diolah Penulis dari berbagai sumber

### Transisi dari Internasionalisasi ke Desentralisasi

Pergeseran dari model tata kelola berbasis intervensi global pada 2004 menuju model domestikdesentralistik pada 2025 merupakan refleksi dari dinamika evolusi struktur kelembagaan bencana nasional dan respons terhadap perubahan karakter risiko bencana itu sendiri. Pada 2004, respon pascabencana tsunami dipicu oleh kebutuhan akan koordinasi lintas aktor yang sangat besar dan kompleks, yang melibatkan lebih dari 600 lembaga donor internasional dan nasional. Kondisi ini mendorong lahirnya kerangka kelembagaan yang bersifat luar biasa seperti pembentukan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) AcehNias, yang diberi mandat khusus untuk mengelola sumber daya besar dan koordinasi multilevel (Syamsidik et al., 2021; Lassa et al., 2022; Benazir et al., 2026). Situasi tersebut menggambarkan fase di mana kapasitas lokal masih sangat terbatas sehingga ketergantungan pada mandat global ad hoc menjadi keniscayaan untuk menjembatani celah kemampuan administratif dan teknis pemerintah daerah (Syamsidik et al., 2021)

Peralihan menuju tata kelola yang lebih desentralistik pada 2025 mencerminkan keberfungsian kerangka kelembagaan formal yang dikembangkan setelah tsunami, termasuk prinsip desentralisasi yang diamanatkan oleh UndangUndang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan pembentukan BNPB serta BPBD. Dalam konteks ini, pemerintah daerah memiliki otoritas yang lebih besar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penanggulangan bencana. Paradigma baru ini menempatkan respon bencana sebagai urusan pemerintah domestik dengan koordinasi antar tingkat pemerintahan, daripada sepenuhnya bergantung pada bantuan internasional. Namun, desentralisasi juga mengubah pola alokasi sumber daya dan pengambilan keputusan, di mana tantangan teknis, fiskal, dan kapabilitas administratif menjadi faktor penentu efektivitasnya.

Faktor lain yang turut memengaruhi pergeseran ini adalah diferensiasi persepsi risiko di mata donor internasional. Peristiwa seperti tsunami 2004 dengan karakteristik *sudden onset* dan dampak destruktif besar memicu mobilisasi dana global secara cepat dan signifikan. Sebaliknya, bencana hidrometeorologi musiman seperti banjir sering dialokasikan dalam lini tata kelola lingkungan lokal, sehingga kurang menarik perhatian pendanaan internasional dalam jumlah besar meskipun memiliki dampak sosioekonomi yang luas. Perubahan karakter bencana ini memperlihatkan bahwa faktor *issue salience* memainkan peranan dalam menentukan intensitas dan arah tata kelola pascabencana, yang pada akhirnya berimplikasi pada pola distribusi sumber daya dan struktur respons di tingkat subnasional.

### **Implikasi Desentralisasi: Kesenjangan Kapasitas Lokal**

Pergeseran menuju desentralisasi dalam tata kelola pascabencana memiliki implikasi substantif yang berkaitan dengan keseimbangan antara wewenang yang diberikan dengan kapasitas nyata pemerintah daerah. Pada kasus tsunami 2004, BRR diberi mandat operasional dan sumber daya yang luar biasa untuk mengatasi kompleksitas pemulihan pascabencana (Azmeri et al., 2017). Kelembagaan ini mampu menyusun rencana terpadu, mengharmonisasi intervensi donor, serta mengeksekusi program dalam cakupan luas yang mencakup infrastruktur, rehabilitasi sosial, dan pemberdayaan masyarakat, sehingga menciptakan *learning by doing* kelembagaan skala besar (Danugroho, 2021). Model semacam ini menunjukkan pentingnya dukungan terpusat dalam menghadapi dampak bencana besar yang melampaui kapasitas lokal.

Sementara itu, dalam model desentralistik yang diterapkan pada banjir 2025, BPBD dihadapkan pada tantangan yang kompleks akibat keterbatasan kapasitas fiskal dan teknis di tingkat daerah. Meskipun secara formal BPBD memiliki otoritas untuk merumuskan dan mengeksekusi kebijakan mitigasi dan pemulihan, sumber daya yang tersedia tidak sebanding dengan kebutuhan operasional di lapangan. Hal ini menciptakan kondisi di mana respons daerah masih didominasi oleh fase tanggap darurat seperti distribusi logistik dan evakuasi, sementara perencanaan pemulihan struktural dan mitigasi risiko jangka panjang belum terwujud secara optimal, khususnya dalam integrasi tata ruang berbasis risiko (*disaster riskbased spatial planning*).

Kesenjangan kapasitas ini memperlihatkan bahwa desentralisasi tanpa dukungan terarah dalam bentuk pembiayaan, penguatan kelembagaan, dan pembangunan sumber daya manusia akan memperlemah efektivitas tata kelola pascabencana (Khasanah, 2021). Kapasitas fiskal yang terbatas membatasi kemampuan pemerintah daerah untuk melakukan perencanaan mitigasi yang komprehensif dan pemulihan yang berkelanjutan. Hal ini juga menguatkan argumen bahwa kemampuan teknis dalam mitigasi risiko harus menjadi fokus dalam rencana pembangunan daerah jika desentralisasi ingin dijawantahkan secara substansial dalam konteks penanggulangan bencana masa depan.

### **Kemunduran Partisipasi Masyarakat**

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu dimensi penting dalam tata kelola bencana yang berfungsi sebagai penguat legitimasi, efektivitas implementasi, dan keberlanjutan program pembangunan pascabencana. Pada tsunami 2004, partisipasi masyarakat dirancang secara *terstruktur*

melalui mekanisme yang didukung oleh lembaga donor internasional, seperti program *Aceh Nias Settlement Support Programme* (ANSSP). Pendekatan *communitydriven development* ini mensyaratkan keterlibatan aktif kelompok masyarakat terdampak dalam proses perencanaan, alokasi sumber daya, dan pelaksanaan kegiatan pemulihan. Kondisi ini memfasilitasi pembentukan modal sosial, ruang dialog antaraktual aktor, serta kesadaran kolektif dalam mengatasi dampak pascabencana.

Namun pada banjir 2025, pola partisipasi masyarakat cenderung *ad hoc* dan kontekstual, bergantung pada kesiapan lokal dan inisiatif individual komunitas tanpa adanya platform formal yang terstandarisasi di dalam birokrasi daerah (Przeybilovicz & Cunha, 2024; Yang et al., 2024). Perbedaan ini menggambarkan kegagalan dalam *institutionalizing participation*, yakni kemampuan sistem pemerintahan untuk mengintegrasikan keterlibatan masyarakat sebagai bagian dari prosedur operasi standar (*Standard Operating Procedures*) dalam manajemen bencana. Hilangnya mekanisme organisasi partisipatif yang kuat setelah berakhirnya pendanaan donor internasional pada 2004 menunjukkan bahwa kebijakan partisipasi belum diperkuat secara kelembagaan.

Konsekuensi dari kemunduran ini dapat dilihat dari dominasi pendekatan topdown dalam perumusan kebijakan mitigasi dan pemulihan pascabanjir, yang kurang responsif terhadap kearifan lokal dan realitas sosial di tingkat desa. Tanpa keterlibatan aktif masyarakat dalam penyusunan peta risiko, sistem peringatan dini (*early warning systems*), dan pengambilan keputusan, respons kebijakan cenderung bersifat normatif dan lebih terpusat pada kewenangan administratif pemerintah (Wibowo, 2026). Ini berimplikasi pada rendahnya adaptasi komunitas terhadap risiko perubahan iklim, serta berkurangnya rasa kepemilikan terhadap hasil kebijakan bencana jangka panjang.

### **Transformasi Paradigma dan Tantangan Masa Depan**

Secara konseptual, tata kelola pascabencana di Aceh telah mengalami transformasi paradigma dari orientasi *response and reconstruction* pada 2004 menuju orientasi *disaster risk reduction* pada 2025. Transformasi ini sejalan dengan prinsip *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction* yang menekankan reduksi risiko melalui perencanaan berkelanjutan, keterlibatan lintas sektor, dan pertukaran pengetahuan antara pemangku kepentingan. Namun, perubahan paradigma lebih banyak terefleksi pada tataran regulasi dan kebijakan daripada pada implementasi teknis di tingkat lokal (Pudjiastuti et al., 2022).

Salah satu tantangan utama adalah lemahnya integrasi antara kebijakan penanggulangan bencana dan perencanaan tata ruang berbasis risiko (Setiowati & Koestoer, 2022). Meskipun kebijakan DRR telah diadopsi dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, perwujudannya dalam bentuk kebijakan operasional seperti penataan ruang yang responsif risiko dan mekanisme pendanaan mitigasi struktural masih belum optimal. Hal ini menunjukkan bahwa transformasi paradigma DRR belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan kapasitas teknis, koordinasi lintas lembaga, dan komitmen sumber daya yang memadai.

Ke depan, perlu adanya redefinisi hubungan pusatdaerah dalam penanganan bencana hidrometeorologi yang dipicu oleh perubahan iklim. Pemerintah pusat tidak dapat membiarkan BPBD bekerja secara independen tanpa dukungan mekanisme pendanaan khusus (*earmarked funds*) yang diarahkan untuk mitigasi struktural dan pemulihan pascabanjir di tingkat kabupaten/kota. Selain itu, penguatan kapasitas teknis aparat daerah, pembentukan pusat sumber daya pengetahuan

DRR, dan investasi dalam sistem peringatan dini yang terintegrasi harus menjadi bagian dari agenda pembangunan nasional untuk mewujudkan tata kelola pascabencana yang adaptif, responsif, dan berkelanjutan.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa tata kelola pascabencana di Aceh telah mengalami pergeseran paradigma dari model berbasis intervensi global pada tsunami 2004 menuju model desentralistik dan berbasis kapasitas domestik pada banjir 2025. Pergeseran ini tidak hanya dipengaruhi oleh karakteristik bencana, tetapi juga oleh evolusi kelembagaan, kematangan regulasi, dan dinamika partisipasi masyarakat. Hasil analisis komparatif empat indikator tata kelola—koordinasi kelembagaan, transparansi dan akuntabilitas, partisipasi masyarakat, serta efektivitas implementasi kebijakan—menunjukkan bahwa meskipun Aceh kini lebih mandiri, keterbatasan kapasitas lokal, lemahnya integrasi tata ruang berbasis risiko, dan kurangnya mekanisme partisipasi formal tetap menjadi hambatan utama dalam pencapaian pemulihan yang efektif dan berkelanjutan.

Implikasi praktis dari temuan ini menekankan pentingnya penguatan integrasi kelembagaan lintas sektor, pelembagaan mekanisme partisipasi masyarakat secara formal, serta sinkronisasi antara kebijakan penanggulangan bencana dan perencanaan tata ruang berbasis risiko. Bagi pembuat kebijakan, penelitian ini menyarankan agar alokasi dana khusus (*earmarked funds*), peningkatan kapasitas teknis aparat daerah, dan pembangunan sistem peringatan dini yang terintegrasi menjadi prioritas utama. Secara teoretis, studi ini memberikan kontribusi dalam memperluas pemahaman tentang *multi-level governance* dan *resilience* dalam konteks tata kelola pascabencana, serta menegaskan bahwa efektivitas kebijakan bencana tergantung pada kualitas koordinasi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat.

Untuk riset masa depan, disarankan melakukan studi lapangan kualitatif melalui wawancara mendalam dengan aktor-aktor tata kelola di tingkat lokal untuk memperoleh data primer yang lebih representatif. Penelitian lintas provinsi atau lintas negara yang mengalami bencana besar juga relevan untuk mengidentifikasi faktor-faktor keberhasilan atau kegagalan tata kelola pascabencana secara sistematis. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi integrasi antara mitigasi risiko bencana, perubahan iklim, dan pembangunan berkelanjutan untuk merumuskan model tata kelola adaptif dan partisipatif yang lebih efektif di era risiko bencana modern.

## DAFTAR PUSTAKA

- Almusaed, A., Almssad, A., & Yitmen, I. (2025). Qualitative Data Collection and Management. *Practice of Research Methodology in Civil Engineering and Architecture*, 417–454. [https://doi.org/10.1007/978-3-031-97393-2\\_13](https://doi.org/10.1007/978-3-031-97393-2_13)
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. <https://inlislite.ipdn.ac.id/opac/detail-opac?id=9678>
- Azmeri, A., Mutiawati, C., Al-Huda, N., & Mufiaty, H. (2017). Disaster Recovery Indicators of Housing Reconstruction: The Story of Post Tsunami Aceh, Indonesia. *International Journal of Disaster Management*, 1(1), 35–45. <https://jurnal.usk.ac.id/IJDM/article/view/8036>

- Benazir, Kultsum, R., Fauzia, A., Ali, C., Nurkhalis, Triatmadja, R., Rana, A. S. W., Tahalele, M., & Sutanto, M. H. (2026). Long-Term Disaster Risk Implications of Post-Tsunami Housing Reconstruction: An Integrated Socio-Technical Assessment of Community Perception, Structural Performance, and Hazard Exposure in Aceh, Indonesia. *Progress in Disaster Science*, 30, 100596. <https://doi.org/10.1016/J.PDISAS.2026.100596>
- BRR Nias. (2009). *BRR Book Series - Book 7 - HOUSING Roofing the Pillars of Hope*. <https://sejarah.dibi.bnpb.go.id/koleksi-sejarah-bencana/housing-roofing-the-pillars-of-hope/269>
- BNPB. (2025). *Geoportals Data Bencana Indonesia*. <https://gis.bnpb.go.id/bansorsumatera2025/>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2023). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*, 5th Edition. 552.
- Creswell, W. J. (2016). Penelitian Kualitatif dan Desain Riset. *Penelitian Kualitatif*.
- Danugroho, A. (2021). Susilo Bambang Yudhoyono's Government Policy in Handling The Aceh Tsunami : a Historical Research. *Jurnal Ilmu Pemerintahan: Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah*, 6(1), 1–12. <https://doi.org/10.24905/JIP.6.1.2021.1-12>
- BNPB. (2021). *Data Informasi Bencana Indonesia*. <https://dibi.bnpb.go.id/superset/dashboard/2/>
- Irwansyah, M., Nursaniah, C., Qadri, L., & Mariana, M. (2024). City of Prone Natural Disasters: Mitigating Post-Tsunami on the Coastal of Banda Aceh, Indonesia. *Environmental Challenges*, 15, 100925. <https://doi.org/10.1016/J.ENVC.2024.100925>
- Khasanah, L. (2021). Dampak Ketimpangan Pendapatan, Tata Kelola Pemerintahan dan Korupsi terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia. *Bharanomics*, 1(2), 75–81. <https://doi.org/10.46821/bharanomics.v1i2.156>
- Lassa, J. A. (2019). *Post Disaster Governance, Complexity and Network Theory: Evidence from Aceh, Indonesia after the Indian Ocean Tsunami 2004*. <https://www.preventionweb.net/publication/post-disaster-governance-complexity-and-network-theory-evidence-aceh-indonesia-after>
- Lassa, J. A., Nappoe, G. E., & Sulisty, S. B. (2022). Creating an Institutional Ecosystem for Cash Transfer Programming: Lessons from Post-Disaster Governance in Indonesia. *General Economics*. <https://arxiv.org/pdf/2202.04811>
- Mangkusubroto, K. (2011). *Analisis Dinamika Kolaborasi antara Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh dan Nias (BRR) dengan Lembaga Donor Pasca Tsunami 2004 menggunakan Drama Theory*. <https://www.e-jurnal.com/2013/11/analisis-dinamika-kolaborasi-antara.html>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2018). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. SAGE Publications, Inc, XII–384. <https://us.sagepub.com/en-us/nam/qualitative-data-analysis/book246128>
- Przebylłowicz, E., & Cunha, M. A. (2024). Governing in the Digital Age: The Emergence of Dynamic Smart Urban Governance Modes. *Government Information Quarterly*, 41(1), 101907. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2023.101907>
- Pudjiastuti, T. N., Badrun Susantyo, Ratih Probosiwi, Indah Okitasari, Ro'fah, & Yenti Nurhidayat. (2022). Kebijakan Peningkatan Perlindungan Sosial yang Inklusif: Rekomendasi Kebijakan Komite Nasional MOST-UNESCO Indonesia. In *Naskah Kebijakan Peningkatan Perlindungan Sosial yang Inklusif: Rekomendasi Kebijakan Komite Nasional MOST-UNESCO Indonesia*. <https://doi.org/10.55981/brin.672>

- Radyan, O., Asti, D. & Novita, A., & Radyan Dinar, O. (2024). Exploring the Impact of Collaboration on the Implementation of Disaster Governance. *Cogent Social Sciences*, 10(1), 2423051. <https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2423051>
- Sasaki, D., Yolanda, Y., Hara, Y., Sasmita, N. R., & Sofyan, H. (2025). Perception of University Faculty Members on Providing Policy Recommendations for Disaster Risk Reduction and Sustainable Development: A Case Study of Aceh Province, Indonesia. *Sustainability*, 17(17). <https://doi.org/10.3390/SU17178033>
- Setiowati, R., & Koestoer, R. H. (2022). Review Kebijakan Penggunaan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan antara Jakarta dengan New York pada Pandemi COVID-19. *TATALOKA*, 24(1). <https://doi.org/10.14710/tataloka.24.1.15-24>
- Sufri, S., & Lassa, J. A. (2024). Integration of Disaster Risk Reduction and Climate Change Adaptation in Aceh: Progress and Challenges After 20 Years of Indian Ocean Tsunamis. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 113, 104894. <https://doi.org/10.1016/J.IJDRR.2024.104894>
- Sugiyono. (2021). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1543971#>
- Syamsidik, Oktari, R. S., Nugroho, A., Fahmi, M., Suppasri, A., Munadi, K., & Amra, R. (2021). Fifteen Years of the 2004 Indian Ocean Tsunami in Aceh-Indonesia: Mitigation, Preparedness and Challenges for a Long-Term Disaster Recovery Process. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 54, 102052. <https://doi.org/10.1016/J.IJDRR.2021.102052>
- Wibowo, W. (2026). Policy and Institutional Frameworks for Strengthening Entrepreneurial Resilience in Global Crises. *Entrepreneurial Resilience in Turbulent Globalized Economies*, 31–56. <https://doi.org/10.4018/979-8-3373-6991-4.ch002>
- Yang, C., Gu, M., & Albitar, K. (2024). Government in the digital age: Exploring the impact of digital transformation on governmental efficiency. *Technological Forecasting and Social Change*, 208(4), 123722. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2024.123722>
- Yin, R. K. . (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods*. 319. <https://us.sagepub.com/en-us/nam/case-study-research-and-applications/book250150>